

Judul : Haji khusus dirugikan, biro travel nakal rupanya masih ada  
Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 8

## Haji Khusus Dirugikan Biro Travel Nakal Rupanya Masih Ada

ANGGOTA Timwas Haji DPR Wisnu Wijaya meminta Kementerian Agama menindak tegas oknum biro penyelenggara ibadah haji khusus yang menyalahi kesepakatan dengan jemaah. Hal itu disampaikan menyusul aduan sejumlah jemaah haji khusus yang merasa dirugikan akibat pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan akad awal dari pihak travel.

"Aduan yang kami terima dari jemaah haji khusus asal Cikarang bahwa mereka yang sebelumnya dijanjikan untuk ditempatkan di hotel transit bintang 5 justru ditempatkan di hotel bintang 3. Selain itu, makanan yang diberikan juga tidak sesuai dengan standar pelayanan, variannya dinilai sedikit dan seringkali mereka kehabisan jatah makan," ungkap Wisnu.

Anggota Komisi VIII DPR ini mengatakan, selain tidak

menyediakan fasilitas akomodasi sebagaimana yang dijanjikan di awal, pihak travel juga disebut tidak membeli tenda di Mina yang sedianya diperuntukan bagi para jemaah haji khusus.

"Akibatnya, sejumlah jemaah haji khusus ini terancam tidak mendapatkan tenda untuk mabit di Mina," terang politisi PKS ini.

Wisnu mengatakan, temuan terkait dengan pelayanan tidak memuaskan dari oknum travel haji khusus ini akan masuk ke dalam bahasan serius dalam rapat Timwas Haji DPR bersama Kementerian Agama.

"Sebagai wujud komitmen kami terhadap perlindungan jemaah, Timwas Haji DPR mendorong Kemenag melakukan segala hal yang diperlukan

terhadap pihak travel haji khusus yang terbukti menyalahi ketentuan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap jemaah yang dirugikan," tegasnya.

Untuk sementara, bagi para jemaah yang mengeluhkan terkait pelayanan haji diminta menyampaikan aduan resmi lewat aplikasi Kawal Haji Kemenag. Dari situ, dapat dilacak pihak travel mana yang bermasalah dalam hal pelayanan guna ditindaklanjuti oleh Kemenag.

"Jika terbukti bersalah, maka kami mendorong agar mereka diberi sanksi tegas berupa pencabutan izin usahanya atau meminta mereka memberikan kompensasi yang sepadan bagi jemaah yang telah dirugikan," tandasnya.

Sementara, Anggota Timwas Haji DPR Selly Andriany Gantina menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap

fenomena haji backpacker serta penguatan proses keimigrasian oleh pemerintah Indonesia. Hal ini disampaikan Selly terkait perubahan pola kebijakan Pemerintah Arab Saudi mengenai haji dan umrah tersebut.

"Pemerintah Arab Saudi telah melakukan perubahan tentang pola keuangan mereka. Haji dan umrah menjadi salah satu upaya mereka mempromosikan wisata religi, bukan lagi semata-mata fokus pada ibadah," ujarnya.

Menurut Selly, perubahan ini mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam mengatur dan mengawasi keberangkatan jemaah haji dan umrah, terutama yang memilih jalur mandiri (*backpacker*). ■ KAL